

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Tahun 2017-2021)**



**Disusun oleh:**

**Iggres Shinda Prangin-angin**

**12180329**

**FAKULTAS PROGRAM BISNIS STUDI AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021)  
Nama : Iggres Shinda Prangin-angin  
Nim : 12180329  
Mata Kuliah : SKRIPSI  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : Genap  
Tahun Akademik : 2022/2023

Telah Diperiksa dan disetujui

Yogyakarta, 07 Juni 2023

Dosen Pembimbing

  
Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si

DUTA WACANA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iggres Shinda Prangin-Angin  
NIM : 12180329  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**ANGGARAN 2017-2021**  
**(Studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

Yang menyatakan



(Iggres Shinda Prangin-Angin)  
NIM.12180329



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017-2021)”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**NAMA : Iggres Shinda Prangin-Angin**

NIM : 12180329

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

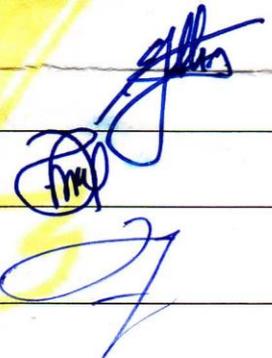
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 26 Juni 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.  
(Ketua Tim Penguji)
2. Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc.  
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Disahkan Oleh



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Rossalina Christianti, S.E., M.Acc.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN 2017-2021)”**

Yang telah saya kerjakan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar.

Yogyakarta, 07 Juni 2023



Iggres Shinda Br. Prangin Angin

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017-2021)”**. Sebagaimana diketahui, penyusunan penulisan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penulisan penelitian, penulis menyadari bahwa setiap proses penulisan dari awal sampai akhir tidak mudah, maka dari itu, penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih M.Si, selaku dosen pembimbing yang mendampingi dan memberikan arahan dalam penyusunan penulisan penelitian.

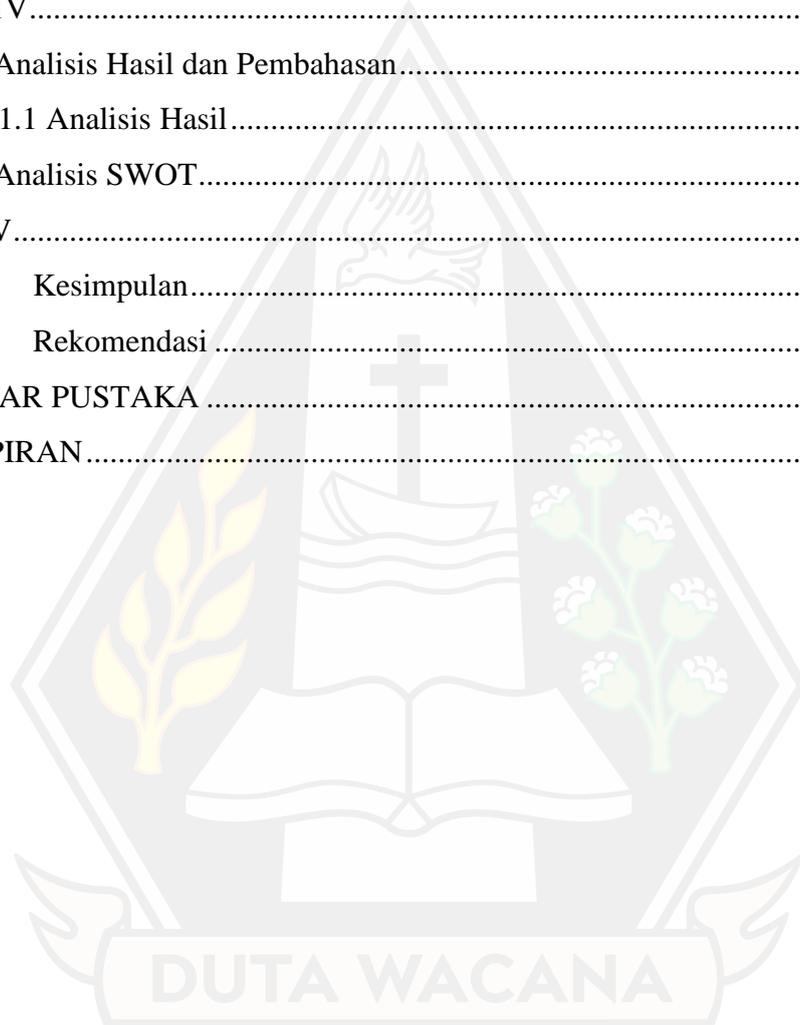
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
BAB II.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2.1.2 Otonomi Daerah.....	13
2.1.3 Keuangan Daerah.....	14
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	14
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Analisis SWOT.....	18
BAB III.....	21

3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data .....	21
3.1.1 Jenis Data .....	21
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.1.3 Teknik Analisis .....	21
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	22
3.2.1 Teknik Analisis Rasio.....	22
3.1.2 Gambaran Umum Daerah .....	25
BAB 1V.....	29
4.1 Analisis Hasil dan Pembahasan.....	29
4.1.1 Analisis Hasil.....	29
4.2 Analisis SWOT.....	36
BAB V.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Rekomendasi .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN.....	46



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi .....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3. 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 4 Tingkat Efektivitas PAD.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 5 Tingkat Keserasian Daerah.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 6 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 4. 1 Rasio Desentralisasi Kabupaten Labuhanbatu Utara .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. 2 Rasio Ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4. 3 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Labuhanbatu .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4. 4 Rasio Kemandirian Kabupaten Labuhanbatu .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 4. 5 Rasio Efektivitas Kabupaten Labuhanbatu.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4. 6 Rasio Keserasian Pada Belanja Operasi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 4. 7 Rasio Keserasian Pada Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017-2021.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4. 8 Rasio Efisiensi Kabupaten Labuhanbatu Utara .....</b>	<b>35</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Akses Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara ..... 38



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran APBD.....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran 2 Halaman Persetujuan.....</b>	<b>53</b>
<b>Lampiran 3 Kartu Konsultasi.....</b>	<b>55</b>



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN 2017-2021)**

**Iggres Shinda Prangin-angin**  
**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**  
**Universitas Kristen Duta Wacana**  
**Email: [iggreshinda@gmail.com](mailto:iggreshinda@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kinerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun anggaran 2017-2021. Sampel penelitian ini menggunakan data sekunder dan kuantitatif dalam arti menggunakan aspek pengukuran, perhitungan. Data tersebut adalah data Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2017-2021 dan dokumen tentang Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, keserasian, ketergantungan, Efisiensi, PAD masih belum stabil pada kinerja keuangan pemerintahan kabupaten labuhan batu utara. sedangkan rasio efektivitas cukup baik dalam kinerja keuangan.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, APBD, Rasio keuangan

**LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS**  
**(CASE STUDY IN LABUHANBATU UTARA DISTRICT**  
**YEAR 2017-2021)**

**Iggres Shinda Prangin- angin**

**Faculty of Business Accounting Study Program**

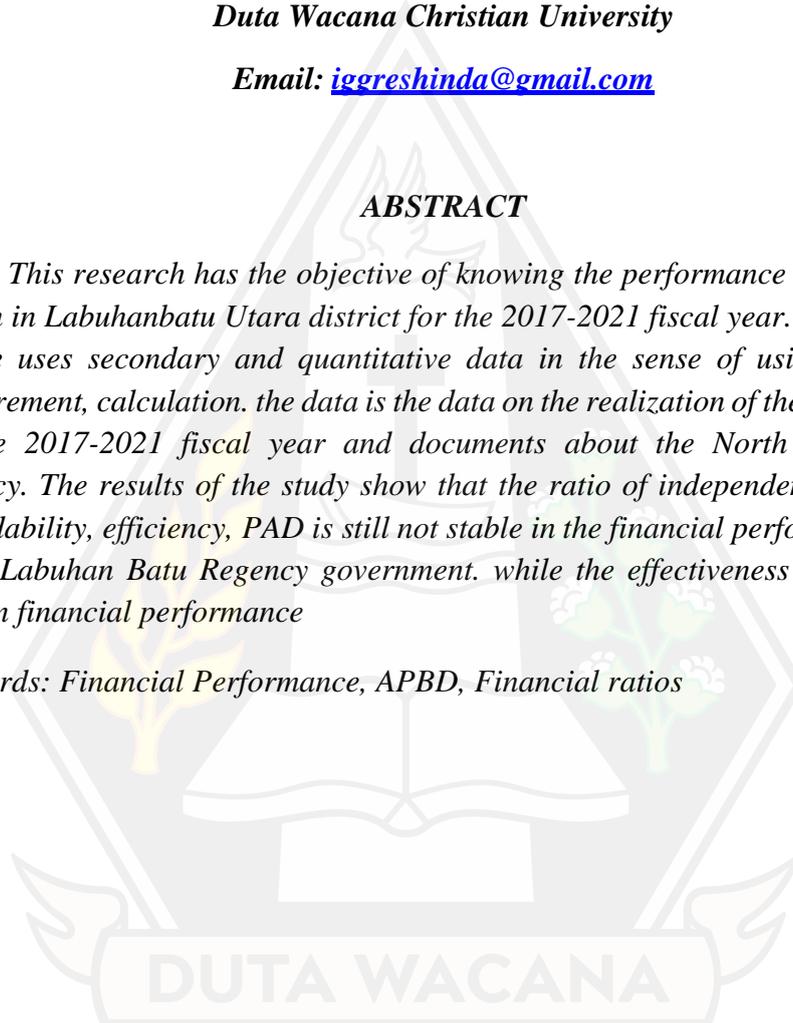
**Duta Wacana Christian University**

**Email: [iggrshinda@gmail.com](mailto:iggrshinda@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This research has the objective of knowing the performance and economic growth in Labuhanbatu Utara district for the 2017-2021 fiscal year. This research sample uses secondary and quantitative data in the sense of using aspects of measurement, calculation. the data is the data on the realization of the APBD report for the 2017-2021 fiscal year and documents about the North Labuhanbatu Regency. The results of the study show that the ratio of independence, harmony, dependability, efficiency, PAD is still not stable in the financial performance of the North Labuhan Batu Regency government. while the effectiveness ratio is quite good in financial performance*

*Keywords: Financial Performance, APBD, Financial ratios*



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

UUD No. 22 Tahun 1999 yang mengamanatkan otonomi daerah sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1999. Selanjutnya UUD No. 32 Tahun 2004 dan UUD No. 23 Tahun 2014 merupakan hasil dari modifikasi UUD No. 23, undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, direvisi. Hak, wewenang, dan asesmen yang dibebankan kepada region otonom guna manajemen beberapa kegiatan pemerintahan serta memperhatikan kesejahteraan warga lokal disebut dengan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kekuasaan untuk mengontrol setiap daerah diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan transparansi penggunaan dana dari APBD, mendorong sisi kompetitif transparan dan konstruktif, dan bertindak sebagai katalisator perubahan transformatif, otoritas ini berharap dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Di bawah otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan berfungsinya mesin pemerintah secara produktif, alhasil mendorong keikutsertaan masyarakat dalam upaya ekspansi daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengedepankan kejujuran dan keadilan, sehingga memberdayakan pertumbuhan dan potensi masing-masing daerah. Untuk memenuhi standar kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, pemerintah daerah harus mengutamakan penilaian kinerja yang akurat untuk mencapai tujuan menyeluruh dalam merealisasikan tata usaha kota maupun birokrasi pemerintahan yang baik dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara konsisten dan transparan secara bertanggung jawab.

Penyelenggaraan fungsi birokrasi pemerintahan oleh Pemda dan DPRD yang berlandaskan nilai-nilai otonomi dan pemerintahan bersama yang menekankan derajat otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, yang dapat diarah ke makna dalam ayat (3), Pemerintah Daerah berfungsi sebagai penguasa utama di daerah, bertindak sebagai badan administratif yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam wilayah otonominya.

Pemahaman ini mengarah pada pemekaran Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi-provinsi. Daerah, yang meliputi kota dan kabupaten, di setiap provinsi tersegmentasi lebih lanjut. Masalah pemerintahan dikelola secara terpisah oleh pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan lokal. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang paling memungkinkan, dengan pengecualian situasi ketika tanggung jawab pemerintah pusat secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Mereka memiliki kekuasaan untuk memberlakukan hukum lokal dan aturan lain yang diperlukan untuk realisasi kerjasama dan otonomi. Aturan legislatif menetapkan kerangka kerja dan metode operasi untuk administrasi pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan faktor krusial yang harus diprioritaskan oleh setiap daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan berperan sebagai penentu mendasar indikator keberhasilan dan index pembangunan daerah serta akomodasi dalam memfasilitasi sistem birokrasi pemda. Pengelolaan keuangan daerah yang optimal dan terkelola dengan baik berperan penting dalam menjamin terwujudnya tujuan pembangunan dan fokus pengendalian kinerja pemda. Inovasi suatu region yang berkembang dapat dievaluasi berdasarkan praktik pengelolaan pengauditannya (Sularso & Restianto, 2011). Suatu keuangan daerah yang dikelola harus diaplikasikan berdasarkan asas-asas yang telah dijaikan acuan seperti nilai transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat terdorong (Lucky, 2013).

Sejak reformasi tahun 1998, keuangan daerah di Indonesia telah muncul sebagai domain yang signifikan dalam akuntan publik, mendapatkan perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan. PP No. 33 Tahun 2004 tersebut kemudian direvisi dan diperbaharui dengan PP No. 1 Tahun 2022 yang masih berlaku hingga saat ini. Sistem moneteri daerah meliputi segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi nilai moneter dan kekayaan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan tanggung jawabnya. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah meliputi rangkaian aktivitas yang menyeluruh, termasuk perancangan, pealokasian dana, pengaktualan, pengadministrasian, perawatan, komitmen, dan inspeksi keuangan daerah (BPK, 2022).

Tujuan pembiayaan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dan untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, dari dana moneter (dalam rupiah) yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pemerintah, khususnya kesejahteraan rakyat.

Untuk mengatur kebijakan keuangan daerah secara efektif, Mardiasmo (2002) mencantumkan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah. Pedoman ini terdiri dari:

- Akuntabilitas memastikan bahwa pembuat keputusan berperilaku etis dan terbuka dan memfasilitasi akses dan komunikasi kebijakan.
- *Value for Money*, dengan fokus pada administrasi moneter dan alokasi dana daerah yang efektif, hemat, serta efisien.
- Probitiy, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pengelolaan dana publik.
- Transparansi, mendorong transparansi dalam perumusan kebijakan daerah, memungkinkan pengawasan oleh DPRD dan komunitas luas.

Pengendalian yang meliputi pengawasan terhadap pendapatan dan belanja APBD diperlukan untuk segera menyelesaikan potensi penyimpangan.

Mengacu pada “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode anggaran tahun 2023” yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditetapkan bahwa APBD merupakan cetak biru keuangan secara periodic tahunan pemda, yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyusunan APBD mengikuti pendekatan yang

berorientasi pada kinerja, menekankan pada sistem penganggaran yang mengutamakan upaya-upaya yang ditujukan untuk mencapai output atau hasil kerja yang direncanakan melalui alokasi input yang ditetapkan.

Pemberian keistimewaan otonomi daerah kepada pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah, menegaskan semakin pentingnya pengelolaan keuangan yang solid dan tepat. Upaya keras selama periode anggaran, sejalan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, menghasilkan pencapaian keberhasilan keuangan di bidang keuangan daerah, yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah (Sucipto, 2005).

Menurut penelitian Halim (2008: 203), pengukuran kinerja melibatkan kontras hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi pola yang muncul. Menerapkan rasio keuangan pada APBD, seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas, memungkinkan dilakukannya analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan (Halim, 2008: 230). Indikator seperti Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Efisiensi dimasukkan dalam evaluasi studi ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memainkan posisi penting dalam administrasi keuangan daerah, khususnya.

Prasojo et al. (2019: 87), pengukuran kinerja keuangan juga berperan penting dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, termasuk warga negara, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Ini

memberikan penilaian yang obyektif tentang bagaimana sumber daya publik digunakan, memastikan bahwa dana dialokasikan ke bidang prioritas dan layanan publik disampaikan secara efektif.

Sebagai pemerintah daerah yang telah menerapkan otonomi daerah, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 8 (delapan) Kecamatan dimana Kecamatan Kualuh Hulu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai  $637,39\text{km}^2$  dan Kecamatan Sek Kuo merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya  $250,2\text{km}^2$ . Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah pantai dan pegunungan. Kabupaten Labuhanbatu Utara juga memiliki banyak potensi, yaitu:

1. Pertanian: Wilayah ini menawarkan sawah yang luas dan tanaman terkenal seperti Beras Kuku Balam (BKB) dari Kabupaten Tanjung Leidong dan Kualuh Hilir, bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan cabai.
2. Perkebunan: Perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi andalan, baik milik perseorangan, perusahaan swasta, maupun badan usaha milik negara. Luasnya meliputi 87.727 hektar perkebunan kelapa sawit dan 18.455 hektar perkebunan karet.
3. Perikanan: Dengan wilayah laut yang luas dan garis pantai sepanjang 75 kilometer di sepanjang Selat Malaka, kawasan ini menghadirkan peluang dalam perikanan. Wilayah pesisir dan laut cocok untuk budidaya udang dan ikan kerapu, didukung oleh tiga anak sungai yang signifikan.
4. Peternakan: Lahan perkebunan yang luas di kabupaten memfasilitasi pengembangan peternakan, menyediakan pakan ternak dan area penggembalaan. Sektor peternakan terdiri dari sapi potong, kerbau, domba,

dan babi, dengan populasi tercatat 2.079 ekor sapi, 10 ekor kerbau, 655 ekor domba, dan 250 ekor babi pada tahun 2021.

5. Pertambangan: Secara khusus, endapan batubara dapat ditemukan di Kabupaten Kualuh Selatan dan Kualuh Hulu, sementara cadangan minyak dan gas bumi terletak di Kabupaten Merbau dan Aek Kuo.
6. Industri pengolahan: Selain pengolahan kelapa sawit, karet, dan kakao, terdapat industri skala kecil seperti pembuatan kerupuk dan terasi di Kecamatan Kuluh Leidong.
7. Pariwisata: Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki bentang alam, perbukitan, sungai, dan pesisir pantai yang masih terjaga potensinya untuk pengembangan pariwisata. Peluang meliputi kegiatan seperti arung jeram, wisata sawah, puncak Haumalela, air terjun Aek Sordang, dan atraksi lainnya.

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki banyak potensi yang dapat menjadi PAD di daerah. Tetap pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dengan baik dan pemerintah juga belum bisa dikatakan sempurna dalam pengelolaan keuangannya, karena masih banyak kendala yang harus dibenahi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan belum bisa dikatakan baik karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P oleh Bupati Khairuddin Syah Sitorus yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari 2010-2021. Diketahui dana yang diambil sebesar 2,1M dan pada tahun 2021 beliau telah di hukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dan di denda sebesar 100jt. Sehingga dari kasus korupsi ini

Sehingga dari kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan atau kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik berfungsi untuk menilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menjadi *benchmark* agar kinerja daerah dapat berefleksi dan meningkatkan performa sesuai dengan visi dan misi pemda.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yaitu oleh Juli Ronaldo Damanik (2018) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Peneliti hanya menggunakan empat rasio saja, yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Peneliti juga melakukan penelitian di tahun anggaran 2010-2017.

Kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah secara efektif bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerah dan potensi yang ada di daerah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memperlancar pembangunan, Kabupaten Labuhanbatu Utara harus memberikan audit pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga dapat ditentukan apakah pemda telah melaksanakan tugasnya secara efektif. Mengingat konteks ini, peneliti ingin tahu tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran 2017-2021”.

Keberlanjutan organisasi bergantung pada pentingnya melakukan evaluasi eksternal dan internal. Gagasan ini juga dikemukakan oleh Albert S. Humphrey, seorang konsultan manajemen Amerika, yang memperkenalkan metode analisis

SWOT, yang meliputi penilaian terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT berfungsi sebagai alat analisis yang berharga bagi organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Grameds bisa sangat diuntungkan dengan memanfaatkan analisis SWOT karena membantu dalam persiapan dan perencanaan proyek atau usaha bisnis. Sederhananya, analisis SWOT dapat dianggap sebagai pendekatan perencanaan strategis yang mempertimbangkan dan mengkaji empat komponen utama seperti *Strengths* (Kekuatan); *Weaknesses* (Kelemahan) *Opportunities* (Peluang); dan *Threats* (Ancaman).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja dan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017-2021 diukur dengan dengan (1) Rasio Desentralisasi, (2) Rasio Ketergantungan, (3) Rasio Pertumbuhan, (4) Rasio Kemandirian, (5) Rasio Efektivitas, (6) Rasio Keserasian, dan (7) Rasio Efisiensi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Mengetahui serta memahami dengan baik kinerja keuangan pemerintah pada Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Bagi Pemerintah

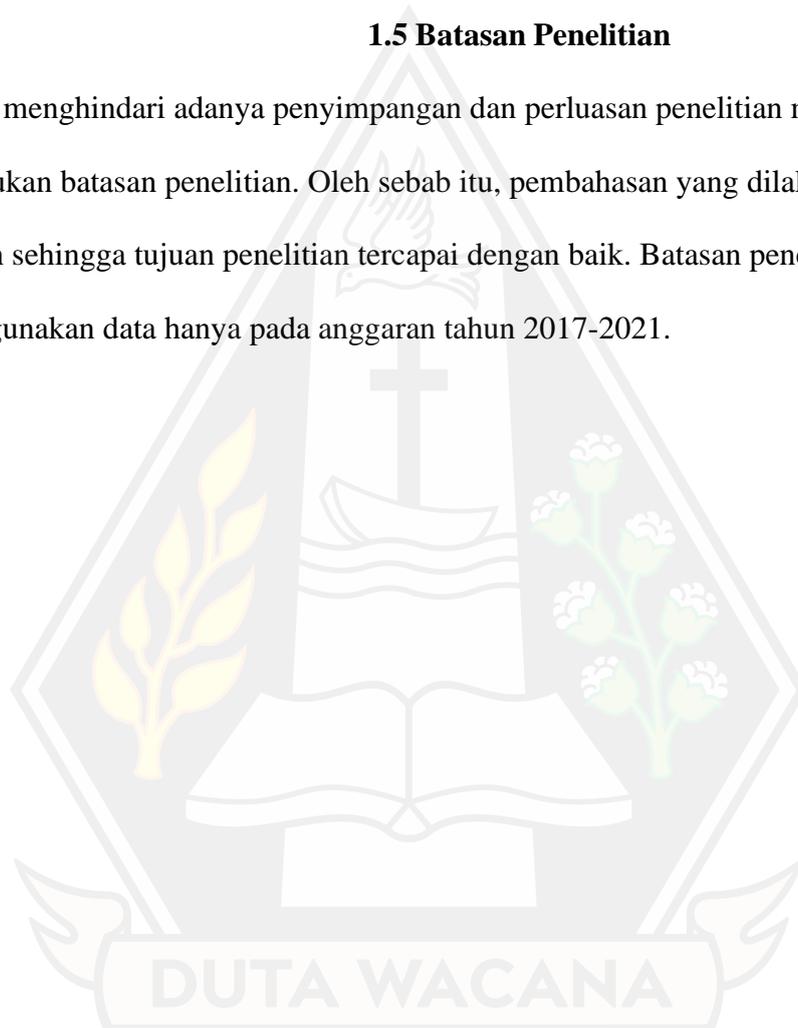
Menjadi pedoman untuk kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan dan dapat menjadi arsip.

### 3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan anggaran keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan perluasan penelitian maka diperlukan batasan penelitian. Oleh sebab itu, pembahasan yang dilakukan lebih terarah sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik. Batasan penelitian ini menggunakan data hanya pada anggaran tahun 2017-2021.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Selaras dengan diskusi dari sub-bab sebelumnya, alhasil peneliti menyimpulkan berdasarkan analisis data yang sudah diolah dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif rasio kemandirian, Kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini kurang optimal dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Maka hal ini merujuk kepada suatu pola kasualitas yang memiliki keunikan dari sifat instruktifnya, yang mana pihak pusat lebih mendominasi dibandingkan dengan kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah yang berada di bawah 25% mencerminkan kemandirian Kabupaten Labuhanbatu Utara rata-rata hanya 6,40%.
2. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki efektivitas yang baik dalam mengelola PAD dan signifikansi progress yang mengndikasikan meningkat setiap kuartalnya. Rata-rata efektivitas yang didapatkan sebesar 109,68%, sehingga dari tahun 2017-2021, masih termasuk kriteria sangat efektif.
3. Dilihat dari rasio efesiensi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara masih termasuk kategori belum memadai untuk mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat diinterpretasikan jika bisa mendapatkan hasil rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 97,65%.
4. Dilihat dari rasio keserasian, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan dananya masih belum seimbang, karena dana APBD yang

digunakan sebagian besar untuk belanja operasional, yaitu rata-rata yang didapatkan sebesar 67,24%. Pada rasio belanja modal, dana APBD yang digunakan masih sangat rendah yaitu terdapat rata-rata sebesar 18,26%.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dikategorikan rendah, dikarenakan rata-rata yang didapatkan sebesar 9,05%. Dari rata-rata yang dihasilkan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum dapat mengelola keuangan daerah atau dana APBD dengan baik, karena tidak mengalami peningkatan pertumbuhan.
6. Dilihat dari rasio ketergantungan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, karena hasil rata-rata yang didapatkan sebesar 88,81%. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus bisa mengelola potensi sumber pendapatan yang ada di daerah, karena dengan mengelola atau mengoptimalkan potensi dengan baik, maka akan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintahan pusat.

## **5.2 Rekomendasi**

### **A. Pemerintah**

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat menggali potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di kabupaten, seperti pembukaan objek wisata baru.
2. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparaturnya daerah.

3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus dapat meminimalisasikan anggaran daerahnya untuk belanja operasi dan dapat mengalokasikan anggaran daerahnya untuk belanja modal, agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

#### B. Peneliti Selanjutnya

1. Pengumpulan data penelitian ini hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan selama periode 2017-2021, tanpa melibatkan wawancara langsung dengan pejabat pemerintah daerah oleh penulis.
2. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan beberapa rasio. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memasukkan rasio tambahan yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Apabila peneliti selanjutnya berniat untuk melakukan penelitian serupa, disarankan untuk memperpanjang durasi penelitian untuk meningkatkan akurasi analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain itu, memperluas cakupan penelitian di luar Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga mencakup seluruh Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S. (2017). Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Dalam A. S.. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Agnes, S. (2001). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan .
- Amin, M. M. (2017). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdes).
- Astuti. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa).
- Badrul, M. (2003). Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah Yogyakarta .
- BPK, B. (2022). *kewenangan pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.*
- Bungin, B. (2010). Penelitian Kuantitatif Komunikasi EKonomi Kebijakan Publik dan ilmu sosial lainnya .
- D. P. (2011). Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemda Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007-2009. *Jurnal Educatio* , Vol 6 Hal.57-80.
- Dwirnandra. (2011). Efektivitas Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota provinsi Bali tahun 2002-2006. *Skripsi* .
- H, H. (2008). Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan pengangguran . *Konfrensi Penelitisn Jawa Timur* .
- Hakkumuloh, M. (2010). Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) .
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.* ELSEVIER.
- Juddy Juallian Pilat, J. M. (2011). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintrah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Volume 06, Journal Accountability* .
- Mardiasmo. (2022). Akuntansi Sektor Publik . *Andi* .

Meldi. (1996). Analisis Efektivitas, Efisiensi anggaran Pendapatan dan belanja daerah .

Moch. Shultomi, D. A. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja APBD Desa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* ,Vol. 17 No. 1(2019) .

Munawir. (2001). Akuntansi Keuangan dan Manajemen. *BPFE* .

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Surakarta ). 7(13).

Prio, Danang. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 20017-2009.

Rachmawati, N. (2007). Akuntansi Pemerintahan.

S. A. (2008). Otonomi Daerah dari masa ke masa .

Statistik, B. P. (t.thn.). *Badan Pusat Statistik*.

Susanto, B. I. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Jurnal Mtara* .

Sunarya, Herni. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

U. Y. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDdes). *Universitas PGRI Yogyakarta* .

DUTA WACANA

